



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
Nomor : 100.3.1.1/K.1a/2024**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang terarah, terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
  - b. bahwa penyusunan Peraturan Kepala Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangannya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dibahas pada Tahun 2024;
- KETIGA : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka dapat dilakukan perubahan atas Keputusan ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur – Samarinda;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim – Samarinda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu – Ujoh Bilang;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu – Ujoh Bilang;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu - Ujoh Bilang;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 100.3.1.1/K.1a/2024  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2024  
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	UNIT / INSTANSI TERKAIT (7)	TARGET PENYAMPALAN (8)	KETERANGAN (9)
				BARU	UBAH/ CABUT				
1.	PERBUP	KETENTUAN BATAS WAKTU PENERBITAN SURAT PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DAN SANKSI KETERLAMBATAN PENYAMPALAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN	Pelaksanaan ketentuan pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru		2024	BPKAD	2024	
2.	PERBUP	PENETAPAN BATAS JUMLAH TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN	Pelaksanaan ketentuan pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru		2024	BPKAD	2024	
3.	PERBUP	PENJABARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Baru		2024	BPKAD	2024	
4.	PERBUP	ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023-2027	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat pada potensi alam dan usaha mikro kecil dan menengah melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi kreatif	Baru		2024	DISPARPORA	2024	
5.	PERBUP	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGEMAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN MAHAKAM ULU	Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NIOP) Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);	Baru		2024	BAPENDA	2024	
6.	PERBUP	PENETAPAN PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN NON PARIWISATA	Penetapan wilayah non pariwisata	Baru		2024	DISPARPORA	2024	Luncuran Propemperkada 2023
7.	PERBUP	RENCANA DETAIL TATA RUANG UJOH BILANG	Memindaklanjuti PP No 21 tahun 2021	Baru		2024	DPUPR	2024	Luncuran Propemperkada 2023
8.	PERBUP	PENETAPAN DAFTAR KAMPUNG, LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023	Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Baru		2024	DPMK	2024	Luncuran Propemperkada 2023

9.	PERBUP	PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Baru		2024	BPKAD	2024	Luncuran Propeperkada 2023
10.	PERBUP	PEDOMAN PENYUSUNAN PERAIHAN KINERJA, RENCANA AKSI, PENGUKURAN KINERJA DAN TATA CARA REVU ATAS LAPORANN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Baru		2024	BAGIAN ORGANISASI	2024	Luncuran Propeperkada 2023
11.	PERBUP	PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Baru		2024	BAGIAN ORGANISASI	2024	Luncuran Propeperkada 2023
12.	PERBUP	TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI ALAT PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA	Tata cara pelaksanaan pembayaran pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak	Baru		2024	BAPENDA	2024	Luncuran Propeperkada 2023
13.	PERBUP	JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU	Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu	Baru		2024	BKPSDM	2024	Luncuran Propeperkada 2023
14.	PERBUP	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu	Baru		2024	BKPSDM	2024	Luncuran Propeperkada 2023
15.	PERBUP	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2021-2026	Rencana Strategis		Ubah	2024	BAPPELTBANGDA	2024	Luncuran Propeperkada 2023
16.	PERBUP	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	APBD Tahun 2024	Baru		2024	BPKAD	2024	
17.	PERBUP	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAI TIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024	Penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.	Baru		2024	BPKAD	2024	
18.	PERBUP	PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE	Penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.	Baru		2024	DINKES	2024	Luncuran Propeperkada 2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 8 Januari 2024  
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIVS BELAWAN GEH